

MODEL PENGUKURAN KINERJA EKONOMI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Sudarti

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: sudarti68@yahoo.com

Nazaruddin Malik

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: nazaruddin@umm.ac.id

Sutikno

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
E-mail: ticno_89@yahoo.co.id

Abstract

The research objective is to measure the economic performance and financial independence of the respective districts or cities in East Java Province. To measure it, the author used physical and non physical abilities, economic and business sector growth, area quality of growth, and financial independence. The benefit is to contribute the development of alternative models of economic performance measurement and financial independence for Regency/City, the form of software measurement of economic performance and financial independence of the Regency/City.

Keywords: *Economic performance, financial independence, and East Java*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja ekonomi dan kemandirian keuangan masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengukurnya, penulis menggunakan kemampuan fisik dan non fisik, ekonomi dan pertumbuhan sektor bisnis, kualitas bidang pertumbuhan, dan kemandirian finansial. Manfaatnya adalah untuk memberikan kontribusi pengembangan model alternatif pengukuran kinerja ekonomi dan kemandirian keuangan untuk Kabupaten/Kota.

Kata kunci: *Kinerja ekonomi, kemandirian finansial, dan Jawa Timur*

Proses otonomi daerah telah membawa kabupaten/kota untuk menata kembali potensi daerah yang selama ini belum tertata secara efektif. Secara sosial-ekonomi masyarakat kabupaten/kota perlu penataan dan peningkatan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan nilai tambah pengembangan kegiatan produktif lainnya, terutama untuk mendukung peningkatan potensi dan daya saing daerah.

Sejalan dengan upaya di atas Pemerintah Daerah Propinsi perlu melakukan kajian pengembangan wilayahnya sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi yang bersifat jangka menengah. Dukungan ini dilakukan dengan cara menggali lebih dalam potensi dan daya saing yang dimiliki setiap daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, agar Pemerintah Daerah Propinsi dapat menginformasikan dan menjual potensi dan daya saing wilayahnya kepada dunia usaha dan masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Propinsi harus menempuh langkah-langkah untuk menumbuh-kembangkan potensi dan daya saing daerahnya, khususnya pusat-pusat kegiatan produksi masyarakat yang dianggap cukup strategis yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Adapun sentra-sentra produksi yang akan ditumbuh-kembangkan adalah sentra produksi potensial, pusat produksi yang telah mendapat dukungan investasi dan memiliki peranan cukup besar di dalam mendukung produksi dalam jangka pendek, dan pusat kegiatan produksi

yang memiliki peran sosial-ekonomi mencakup kawasan antar kabupaten atau kota.

Salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Propinsi Jawa Timur dapat ditempuh dengan mengintensifkan pengembangan setiap daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur. Untuk maksud tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur perlu menyusun rencana pengembangan daerah dengan cara mengidentifikasi peta potensi dan daya saing masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Peta potensi dan daya saing tersebut disamping bermanfaat sebagai acuan investasi oleh pemerintah maupun swasta, dapat pula digunakan sebagai upaya menginformasikan potensi daerah dan peluang pengembangannya.

Dalam jangka pendek, upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi (*foreign direct investment*) pihak luar, sedangkan dalam jangka panjang dapat mendorong perkembangan setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian daerah dan nasional. Hal ini tentunya berkaitan dengan peningkatan daya saing global dan daya saing daerah pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja daya saing daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, mengukur kinerja potensi ekonomi daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, mengukur kinerja kemandirian keuangan daerah

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, dan merumuskan model pengukuran kinerja ekonomi dan kemandirian daerah kabupaten/kota.

Daya saing menurut pernyataan Bank Dunia, "*daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh perusahaan*". Sedangkan Michael Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional tak lain adalah "*produktivitas*" yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Akan tetapi, baik Bang Dunia, Porter, serta literatur-literatur terkini mengenai daya saing nasional memandang bahwa daya saing tidak secara sempit yang hanya mencakup sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak hanya pada level mikro perusahaan, tetap juga mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha (*business environment*) yang jelas-jelas diluar kendali suatu perusahaan. Aspek-aspek tersebut dapat bersifat *firm-specific*, *region-specific*, dan *country-specific* (PPSK-BI, 2001).

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan "*Global Competitiveness Report*", mendefinisikan daya saing nasional sebagai "*kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan*". Fokusnya kemudian adalah pada kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut.

Lembaga lain yang dikenal luas dalam mendefinisikan daya saing nasional adalah *Institute of Management Development (IMD)* dengan publikasinya "*World Competitiveness Yearbook*". Secara lengkap dan relatif lebih formal IMD mendefinisikan daya saing nasional sebagai "*kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam suatu model ekonomi dan sosial*". Dengan kata lain, daya saing nasional adalah suatu konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya.

Keragaman difinisi di atas, sulit rasanya menemukan keseragaman definisi yang sempurna mengenai daya saing. Setidaknya, walau dengan definisi yang tidak begitu seragam, hampir semua ahli mempunyai kesamaan pendapat tentang apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing (Sachs dkk, 2000). Dengan demikian, definisi yang pasti dan disepakati semua pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam rangka mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan daya saing suatu negara (PPSK-BI, 2001).

Sedangkan konsep daya saing daerah terdapat beberapa literatur yang secara eksplisit dan spesifik melakukan studi tentang daya saing daerah, yaitu daya saing suatu wilayah di dalam suatu negara (*regions atau sub-region*),

lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan publikasi mengenai daya saing negara (PPSK-BI, 2001). Dua diantaranya dilakukan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) yang menerbitkan "*Regional competitiveness Indicators*", serta *Centre for Urban and Regional Studies (CURDS)*, Inggris, dengan publikasinya "*The Competitiveness Project: 1998 Regional Benchmarking Report*".

Menurut UK-DTI definisi daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu CURDS mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Melihat definisi di atas dan mengacu pada definisi daya saing nasional yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terdapat persamaan yang esensial. Hal yang membendakan kedua pendefinisian di atas hanya terpusat pada cakupan wilayah, dimana yang pertama adalah negara sementara yang terakhir adalah daerah. Dalam berbagai pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara eksplisit maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional kedalam konsep daya saing daerah (PPSK-BI, 2000).

Walaupun dilihat dari substansinya pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah adalah relevan, namun dalam prakteknya beberapa penyesuaian perlu untuk dilakukan.

Kompetisi ekonomi antar negara yang berdaulat tentu tidak mutlak sama dengan kompetisi antar daerah dalam suatu negara.

Dari pembahasan tentang berbagai konsep dan definisi tentang daya saing suatu negara atau daerah sebagai mana diuraikan di atas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut (PPSK-BI, 2001): (1) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan suatu perekonomian" daripada "kemampuan sektor swasta atau perusahaan"; (2) Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semua terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing; (3) Tujuan dan hasil akhir dari meningkatkan daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat; (4) Kata kunci dari konsep daya saing adalah "kompetisi". Disinilah peran keterbukaan terhadap

kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk mengukur kinerja ekonomi dan kemandirian keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota yang berada dalam wilayah adminstatif Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Untuk mengukur kinerja ekonomi dan kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota, digunakan lima pendekatan, yaitu: fasilitas fisik, non fisik, sektor usaha ekonomi, kualitas pertumbuhan, serta kemandirian keuangan.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Neraca Daya Saing; (2) Scalogram; (3) Location Quotient (LQ); (4) Rasio Pertumbuhan; (5) Tipologi Klassen; (6) Indeks Williamson; (7) Entropi Theil; dan (8) Indeks Desentralisasi Fikal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sektor primer yang mencakup sektor pertanian, sektor pertambangan dan Galian. Sektor ini memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar 18.95%, peran sektor ini didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16.90%.

Sektor Tertier yang terdiri dari dari sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 49.40%. Peran

sektor ini didominasi sektor Perdagangan, Hotel & Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 30.45%.

Berdasarkan hasil analisis struktur ekonomi masing-masing daerah menunjukkan bahwa ada 25 daerah yang aktivitas ekonominya didominasi oleh kontribusi sektor tertier yaitu: Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Malang, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

Sedangkan daerah yang aktivitas ekonominya didominasi sektor primer ada 9 daerah yaitu: Pacitan, Blitar, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Tuban, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara daerah yang mempunyai aktivitas ekonominya yang dominan sektor sekunder adalah daerah kabupaten: Sidoarjo, Gresik, dan Kota Kediri

Pengukuran potensi ekonomi dapat dihitung melalui Sektor Unggulan dan Sektor Potensi masing-masing Kabupaten/Kota. Sektor Unggulan pada Kabupaten/Kota-Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang termasuk dalam sektor unggulan. Sektor unggulan merupakan sektor-sektor yang mempunyai peranan kuat di suatu daerah bila dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain.

Tabel 1. PDRB Propinsi Jawa Timur dan Kontribusi Masing-Masing Sektor Tahun 2006-2007

No	Sektor/Sub-sektor	PDRB Jawa Timur		Kontribusi Masing-Masing Sektor		Rata-rata
		2006	2007	2006	2007	
1	Pertanian	46,486,277.60	47,942,973.38	17.14	16.66	16.90
2	Pertambangan & Penggalian	5,455,159.57	6,024,793.19	2.01	2.09	2.05
	PRIMER	51,941,437.17	53,967,766.57	19.15	18.75	18.95
3	Industri Pengolahan	72,786,972.17	76,163,917.97	26.83	26.46	26.65
4	Listrik & Air Bersih	4,610,041.67	5,154,634.88	1.70	1.79	1.75
5	Bangunan	9,030,294.53	9,139,600.65	3.33	3.18	3.25
	SEKUNDER	86,427,308.37	90,458,153.50	31.86	31.43	31.65
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	81,715,963.35	88,570,614.49	30.13	30.77	30.45
7	Pengangkutan & Komunikasi	15,504,939.79	16,710,214.85	5.72	5.81	5.76
8	Keu., Persewaan, & Jasa Perusah.	13,611,228.97	14,763,619.88	5.02	5.13	5.07
9	Jasa-Jasa	22,048,439.04	23,343,814.62	8.13	8.11	8.12
	TERTIER	132,880,571.15	143,388,263.84	48.99	49.82	49.40
	Produk Domestik Regional Bruto	271,249,316.69	287,814,183.91	100,00	100,00	

Sumber: Jawa Timur dalam Angka, 2008

Sektor ekonomi dikatakan kuat apabila sektor tersebut tidak hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, tetapi juga mampu melayani pasar di daerah lain. Dari hasil analisis LQ dapat diketahui suatu sektor dikatakan sektor unggulan atau bukan, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut; sektor-sektor yang mempunyai angka LQ > 1 termasuk sektor unggulan, sedangkan bila angka LQ < 1 bukan termasuk sektor unggulan. Berdasarkan hasil analisis LQ dapat diketahui bahwa daerah yang mempunyai kinerja paling baik adalah Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya, daerah tersebut mempunyai sektor unggulan paling banyak.

Kota Pasuruan memiliki 6 sektor unggulan, yaitu: 1. Listrik dan Air Bersih; 2. Bangunan/Konstruksi; 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 4. Pengangkutan dan Komunikasi; 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta 6. Jasa-jasa. Dan

memiliki 14 subsektor unggulan, yaitu:

1. Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya; 2. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan; 3. Listrik; 4. Air Bersih; 5. Perdagangan; 6. Angkutan Rel; 7. Angkutan Jalan Raya; 8. Bank; 9. Lembaga Keuangan Bukan Bank; 10. Sewa Bangunan; 11. Pemerintahan Umum; 12. Jasa Sosial Kemasyarakatan; 13. Jasa Hiburan dan Kebudayaan; serta 14. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

Kota Mojokerto memiliki 6 sektor unggulan, yaitu: 1. Listrik dan Air Bersih; 2. Bangunan/Konstruksi; 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 4. Pengangkutan dan Komunikasi; 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta 6. Jasa-jasa. Dan memiliki 13 subsektor unggulan, yaitu: 1. Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; 2. Barang Lain; 3. Listrik; 4. Perdagangan; 5. Restoran; 6. Angkutan Jalan Raya; 7. Bank; 8. Lembaga Keuangan Bukan Bank; 9. Sewa

Bangunan; 10. Pemerintahan Umum; 11. Jasa Sosial Kemasyarakatan; 12. Jasa Hiburan dan Kebudayaan; serta 13. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

Kota Surabaya memiliki 6 sektor unggulan, yaitu: 1. Industri Pengolahan; 2. Listrik dan Air Bersih; 3. Bangunan/Konstruksi; 4. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 5. Pengangkutan dan Komunikasi; serta 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Dan memiliki 13 subsektor unggulan, yaitu: 1. Makanan, Minuman dan Tembakau; 2. Logam Dasar dan Besi dan Baja; 3. Barang Lainnya; 4. Listrik; 5. Gas Kota; 6. Air Bersih; 7. Hotel; 8. Restoran; 9. Angkutan Laut; 10. Jasa Penunjang Angkutan; 11. Bank; 12. Jasa Perusahaan; serta 13. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

Adapun untuk mengetahui Sektor Potensi yang ada pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dapat dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Propinsi Jawa Timur. Apabila pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten, maka sektor tersebut masuk dalam kategori sektor Potensi. Berdasarkan jumlah sektor potensi yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, daerah yang mempunyai kinerja paling bagus adalah daerah Kabupaten Bojonegoro, daerah tersebut mempunyai sektor potensi sebanyak 8 sektor.

Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki sektor potensi yang paling banyak

yaitu 8 sektor yaitu: 1. Pertanian; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Bangunan/Konstruksi; 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 6. Pengangkutan dan Komunikasi; 7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta 8. Jasa-jasa. Dan memiliki 32 subsektor potensi yaitu: 1. Tanaman Bahan Makanan; 2. Tanaman Perkebunan; 3. Kehutanan; 4. Perikanan; 5. Pertambangan Migas; 6. Penggalian; 7. Makanan, Minuman dan Tembakau; 8. Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; 9. Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya; 10. Kertas dan Barang Cetakan; 11. Pupuk Kimia dan Barang dari Karet; 12. Semen dan Barang Galian Bukan Logam; 13. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan; 14. Listrik; 15. Air Bersih; 16. Perdagangan; 17. Hotel; 18. Restoran; 19. Angkutan Rel; 20. Angkutan Jalan Raya; 21. Jasa Penunjang Angkutan; 22. Pos dan Telekomunikasi; 23. Jasa Penunjang Telekomunikasi; 24. Bank; 25. Lembaga Keuangan Bukan Bank; 26. Jasa Penunjang Keuangan; 27. Sewa Bangunan; 28. Jasa Perusahaan; 29. Pemerintahan Umum; 30. Jasa Sosial Kemasyarakatan; 31. Jasa Hiburan dan Kebudayaan; serta 32. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

Berikutnya dilakukan kombinasi antara Sektor Unggulan dan Sektor Potensi. Kombinasi Sektor Unggulan dengan Sektor Potensi bertujuan untuk menentukan sektor dan sub sektor unggulan dan juga mempunyai tingkat potensi tinggi bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Berdasarkan kombinasi di atas, sektor dan sub sektor di masing-masing Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan

menjadi empat yaitu: K1 (Sektor Unggulan dan Sektor Potensi), K2 (Bukan Sektor Unggulan, tapi Sektor Potensi), K3 (Sektor Unggulan, tapi Bukan Sektor Potensi), K4 (Bukan Sektor Unggulan dan Bukan Sektor Potensi)

Berdasarkan keempat klasifikasi sektor dan sub sektor tersebut, tipe K1 merupakan klasifikasi sektor dan sub sektor terbaik, karena disamping merupakan sektor unggulan, sektor dan sub sektor tersebut juga memiliki potensi bila dibandingkan dengan sektor dan sub sektor yang sama di daerah lain. Klasifikasi tipe K1 sebaiknya menjadi prioritas utama dalam pengembangannya, agar dalam jangka panjang dapat lebih memacu pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya. Berdasarkan kriteria sektor potensi, daerah yang mempunyai kinerja paling baik adalah Kota Mojokerto dan Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan mempunyai sektor dengan kriteria K1 sebanyak empat sektor yaitu: 1. Pertanian; 2. Bangunan/Konstruksi; 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan 4. Jasa-jasa. Sementara itu, terdapat 4 subsektor di kabupaten Pacitan yang termasuk K1, yaitu: 1. Peternakan; 2. Kehutanan; 3. Pemerintahan Umum; dan 4. Jasa Hiburan dan Kebudayaan.

Sedangkan di Kota Mojokerto terdapat empat sektor yang termasuk K1 yaitu: 1. Bangunan/Konstruksi; 2. pengangkutan dan komunikasi; 3. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 4. Jasa-jasa. Sementara itu, terdapat 4 subsektor di Kota Mojokerto yang termasuk K1, yaitu: 1. Listrik; 2. lembaga keuangan bukan bank; 3. pemerintahan umum; 4. jasa hiburan dan kebudayaan.

Pengklasifikasian daerah digunakan juga analisis Tipologi Klassen yang menggunakan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal, daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/golongan, yaitu: daerah/Kabupaten/Kota yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah/Kabupaten/Kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah/Kabupaten/Kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah/Kabupaten/Kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Dengan Tipologi Klassen, Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Timur dapat diklasifikasi menjadi empat pola pertumbuhan (lihat gambar 1) yaitu: Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya merupakan daerah dengan pola pertumbuhan wilayah "Cepat Maju dan Cepat Tumbuh", dimana pada umumnya wilayah ini maju baik dari segi pembangunan atau kecepatan pertumbuhan. Kabupaten/Kota yang termasuk kategori Cepat Maju dan Cepat Tumbuh mempunyai pola pertumbuhan; pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lebih besar dari Pendapatan per Kapita Propinsi dan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi. Untuk Kota Kediri merupakan Kota yang tergolong daerah berkembang cepat. Ciri daerah mempunyai

klasifikasi ini adalah daerah yang pertumbuhannya cepat namun pendapatan per kapitanya masih dibawah pendapatan per kapita Propinsi Jawa Timur.

Sedangkan Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Kota Batu tergolong pada pola pertumbuhan wilayah "Maju Tapi Tertekan". Kabupaten/Kota ini adalah Kabupaten/Kota yang relatif maju

tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pola pertumbuhan dari Kabupaten/Kota ini yaitu; pendapatan per kapita Kabupaten/Kota lebih besar dari pendapatan per kapita Propinsi dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi Propinsi.

		Perkapita (IC)	
Pertumbuhan Ekonomi (G)		IC _i > IC _r	IC _i < IC _r
Gi > Gr	(I)	Sidoarjo Gresik Kota Malang Kota Probolinggo Kota Mojokerto Kota Surabaya	(II) Kota Kediri
	(III)	Tulungagung Blitar Malang Lumajang Pasuruan Mojokerto Jombang Nganjuk Bojonegoro Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Madiun Kota Batu	(IV) Pacitan Ponorogo Trenggalek Kediri Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Madiun Magetan Ngawi Tuban Lamongan Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep
Gi < Gr			

Ket. :
 (I) = Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
 (II) = Daerah Berkembang Cepat
 (III) = Daerah Maju Tapi Tertekan
 (IV) = Daerah Relatif Tertinggal
 Gi = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota i
 Gr = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
 IC_i = Perkapita Kabupaten/Kota i
 IC_r = Perkapita kabupaten

Gambar 1. Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Menurut Analisis Tipologi Klassen

Tabel 2. Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Propinsi Jawa Timur, 2006-2007

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Entropi Theil
2006	0.40	0.43
2007	0.40	0.44

Sumber: Jawa Timur dalam Angka, 2008 (diolah)

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tergolong pada pola pertumbuhan wilayah “Relatif Tertinggal”. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori ini adalah Kabupaten/Kota yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita. Dengan kata lain, Kabupaten/Kota dalam kategori ini adalah Kabupaten/Kota yang paling buruk keadaannya dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten/Kota yang termasuk kategori Relatif Tertinggal mempunyai pola pertumbuhan; pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lebih kecil dari pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi propinsi.

Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar-Kabupaten/Kota memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur, untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur, akan dibahas pemerataan produk domestik bruto (PDRB) perkapita antar Kabupa-

ten/Kota yang dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson dan indeks Entropi Theil.

Berdasarkan jumlah penduduk dan produk domestik bruto (PDRB) per kapita Kabupaten/Kota dan Propinsi Jawa Timur tahun 2006 dan 2007 dapat hitung indeks ketimpangan Williamson dan indeks Entropi Theil seperti pada tabel 2.

Angka indeks ketimpangan Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Tabel 2 menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB per kapita antarKabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 0.40 dan 0.40. Hal ini berarti di Propinsi Jawa Timur produk domestik bruto (PDRB) per kapita relatif merata dan dari tahun 2006 ke 2007 ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang terjadi di Propinsi Jawa Timur tidak mengalami perubahan.

Angka indeks Entropi Theil sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 yaitu sebesar 0,43 menjadi 0,44. Indeks Entropi Theil semakin membesar berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar, bila indeksnya semakin kecil maka ketimpangan akan

semakin rendah/kecil pula atau dengan kata lain semakin merata. Hal tersebut sejalan dengan indeks ketimpangan Williamson. Indeks Entropi Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata.

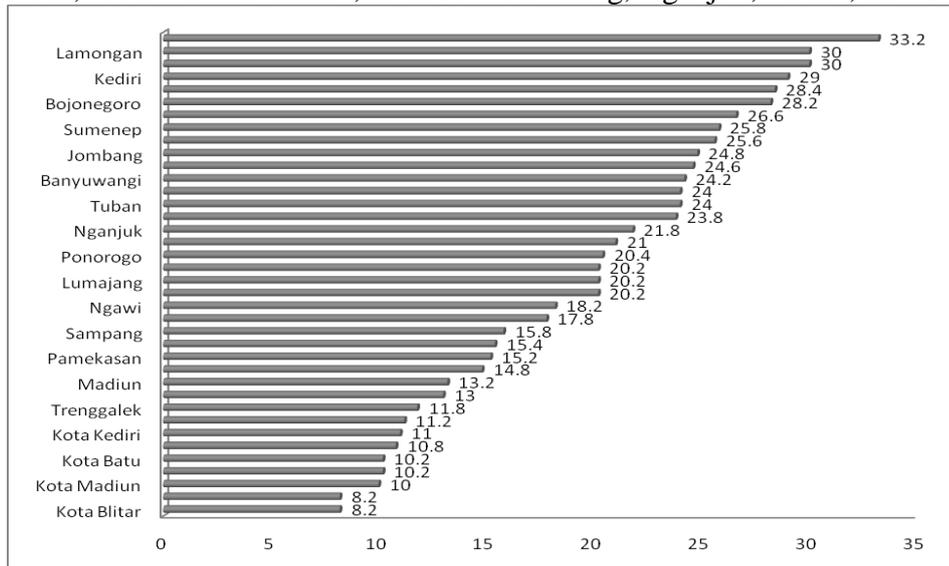
Penggambaran tentang posisi relatif suatu Kabupaten/Kota terhadap Kabupaten/Kota lain dalam hal pencapaian kinerja dari non fisik atau kelembagaan dapat digunakan analisis kinerja non fisik. Indikator-indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam analisis ini lebih bersifat indikator non fisik yang bersifat melekat suatu Kabupaten/Kota, indikator tersebut antara lain: 1. Kondisi Geografis; 2. Kesehatan dan Kesejahteraan; 3. Pendidikan; serta 4. Aktivitas Ekonomi.

Indikator Kondisi Geografis yang digunakan dalam analisis ini meliputi: 1. Luas Daerah; 2. Jumlah Kabupaten/Kota; 3. Jumlah Kelurahan/Desa; 4. Jumlah Penduduk; serta 5.

Kepadatan Penduduk. Dari indikator tersebut akan dilakukan pemeringkatan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis dengan indikator tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kurang Sekali terdapat 9 Kabupaten/Kota, yaitu: Pacitan, Trenggalek, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Batu. Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kurang terdapat 6 Kabupaten/Kota, yaitu: Situbondo, Madiun, Magetan, Sampang, Pamekasan, dan Kota Malang.

Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Cukup terdapat 6 Kabupaten/Kota, yaitu: Ponorogo, Tulungagung, Lumajang, Bondowoso, Ngawi, dan Bangkalan. Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik terdapat 8 Kabupaten/Kota, yaitu: Blitar, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Tuban, dan Gresik.



Gambar 2. Nilai Kondisi Geografis Masing-Masing Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik Sekali terdapat 6 Kabupaten/Kota, yaitu: Kediri, Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, Sumenep, dan Kota Surabaya. Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Sangat Baik Sekali terdapat 3 Kabupaten/Kota, yaitu: Malang, Jember, dan Lamongan. Dari uraian diatas, dari indikator kondisi geografis menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori Kurang sekali yaitu sebanyak 9 Kabupaten/Kota.

Dari aspek kondisi geografis menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Malang, yaitu dengan nilai daya saing sebesar 33,2. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah terdapat dua daerah, yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Mojokerto dengan nilai daya saing sebesar 8,20.

Indikator Kondisi Kesehatan dan Kesejahteraan yang digunakan dalam analisis ini meliputi: 1. Prosentase Cacat Tubuh; 2. Prosentase Tuna Netra; 3. Prosentase Tuna Rungu dan Wicara; 4. Prosentase Cacat Mental; 5. Jumlah Anak Terlantar; 6. Jumlah Anak Nakal; 7. Jumlah Anak Jalanan; 8. Jumlah Tuna Susila; 9. Jumlah Pengemis; 10. Jumlah Gelandangan; 11. Jumlah Fakir Miskin; serta 12. Jumlah Jamaah Haji.

Berdasarkan hasil analisis dengan indikator tersebut menunjukkan bahwa kinerja kabupaten yang masuk dalam kategori Kurang Sekali terdapat 12 Kabupaten/Kota, yaitu: Blitar, Kediri, Malang, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Tuban, dan Kota Surabaya. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk

dalam kategori Kurang terdapat 5 Kabupaten/Kota, yaitu: Jember, Sidoarjo, Jombang, Bojonegoro, serta Bangkalan.

Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Cukup terdapat 7 Kabupaten/Kota, yaitu: Trenggalek, Tulungagung, Bondowoso, Magetan, Ngawi, Pamekasan, dan Kota Kediri. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik terdapat 8 Kabupaten/Kota, yaitu: Lamongan, Gresik, Sampang, Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik Sekali terdapat 4 Kabupaten/Kota, yaitu: Pacitan, Ponorogo, Lumajang, dan Kota Madiun. Kategori Sangat Baik Sekali terdapat 2 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Blitar dan Kota Malang. Dari uraian diatas, dengan indikator kesehatan dan kesejahteraan menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori Kurang sekali yaitu sebanyak 12 Kabupaten/Kota.

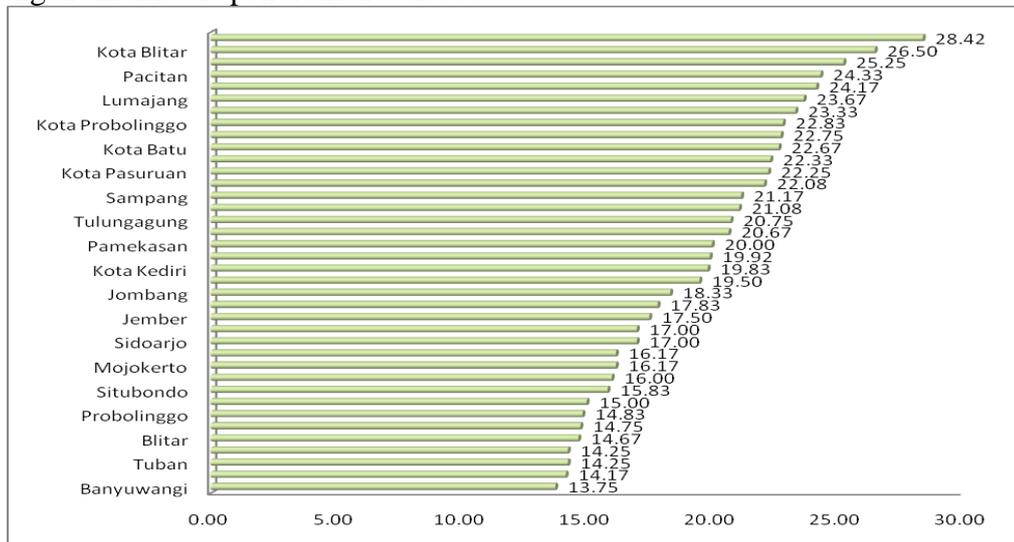
Dari aspek kesehatan dan kesejahteraan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kota Malang, yaitu dengan nilai daya saing sebesar 28,42. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kabupaten Banyuwangi dengan nilai daya saing sebesar 13,75.

Indikator Pendidikan yang digunakan dalam analisis ini meliputi: 1. Prosentase Penduduk diatas usia 15 tahun tidak tamat sekolah; 2. Prosentase Penduduk diatas usia 15 tahun tidak tamat SD/MI; 3. Prosentase Penduduk diatas usia 15 tahun tamat SD/MI; 4. Prosentase Penduduk diatas usia 15 tahun tamat SLTP/MTS; 5.

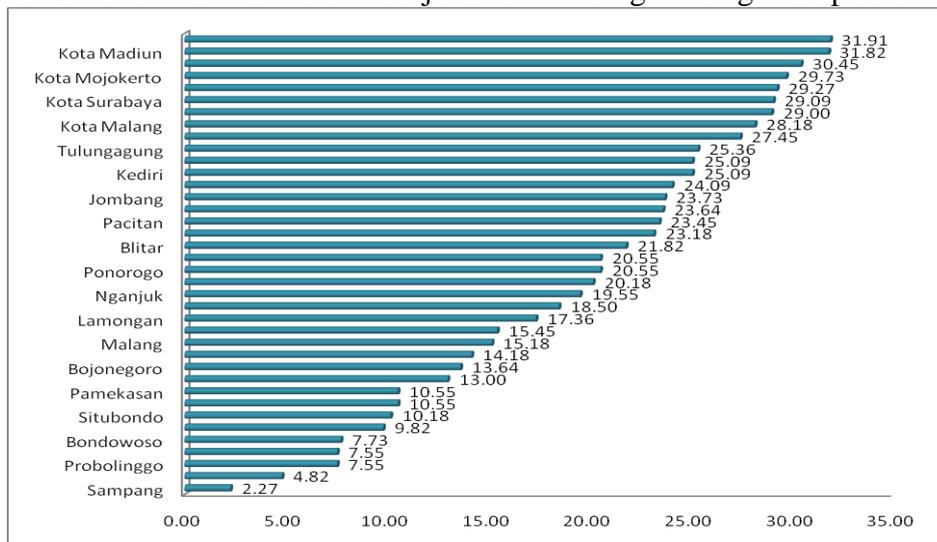
Prosentase Penduduk diatas usia 15 tahun tamat SLTA/MA/SMK; 6. Prosentase Penduduk diatas usia 15 tahun tamat Perguruan Tinggi; 7. Angka Buta Huruf Usia 10 tahun keatas; 8. Angka Buta Huruf Usia 10-44 tahun; 9. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun; 10. Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun; serta 11. Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun. Dari indikator tersebut akan dilakukan pemeringkatan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis dengan indikator pendidikan tersebut

menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kurang Sekali terdapat 2 Kabupaten/Kota, yaitu: Bangkalan dan Sampang. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kurang terdapat 7 Kabupaten/Kota, yaitu: Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pamekasan, dan Sumenep. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Cukup terdapat 5 Kabupaten/Kota, yaitu: Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Bojonegoro, dan Tuban.



Gambar 3. Nilai Kesehatan dan Kesejahteraan Masing-Masing Kabupaten/Kota



Gambar 4. Nilai Kondisi Pendidikan Masing-Masing Kabupaten/Kota

Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik terdapat 7 Kabupaten/Kota, yaitu: Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Nganjuk, Madiun, Ngawi, dan Lamongan. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik Sekali terdapat 8 Kabupaten/Kota, yaitu: Pacitan, Kediri, Magetan, Gresik, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Sangat Baik Sekali terdapat 9 Kabupaten/Kota, yaitu: Sidoarjo, Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Dari uraian diatas, dengan indikator pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori sangat baik sekali yaitu sebanyak 9 Kabupaten/Kota.

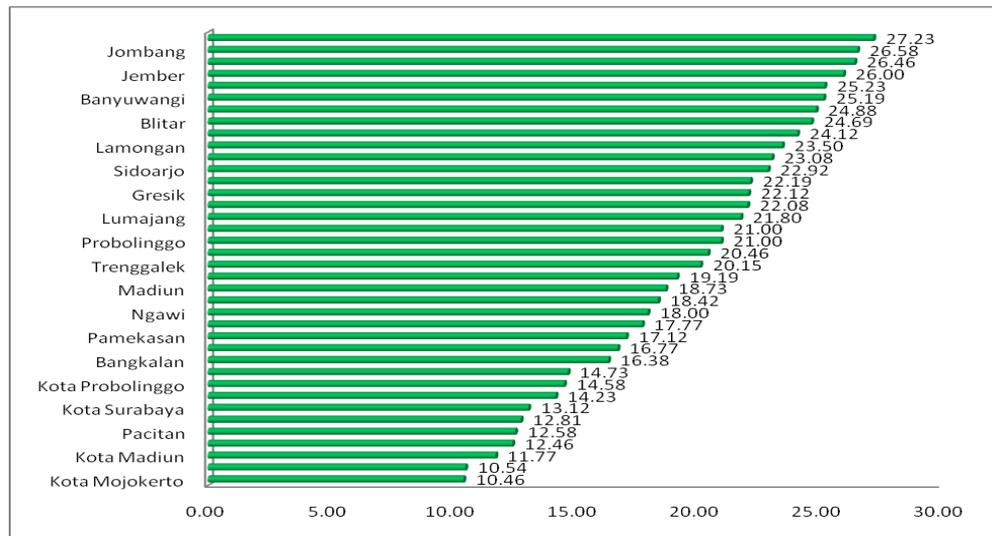
Dari aspek kondisi pendidikan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan nilai daya saing sebesar 31,91. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kabupaten Sampang dengan nilai daya saing sebesar 2,27.

Indikator Aktivitas Ekonomi yang digunakan dalam analisis ini meliputi: 1. Produktivitas Padi; 2. Produktivitas Jagung; 3. Produktivitas Ubi Kayu; 4. Produktivitas Ubi Jalar; 5. Produktivitas Kacang Tanah; 6. Produktivitas Kacang Kedelai; 7. Produktivitas Kacang Hijau; 8. Produktivitas Sapi; 9. Produktivitas Kerbau; 10. Produktivitas Kuda; 11. Produktivitas Kambing; 12. Produktivitas Domba; 13. Produktivitas Babi; 14. Produktivitas Ayam Buras; 15. Produktivitas Ayam Petelur; 16. Produktivitas Ayam

Pedaging; 17. Produktivitas Itik; 18. Produktivitas Entok; 19. Produktivitas Burung Dara; 20. Produktivitas Kelinci; 21. Produktivitas Ikan; 22. Ayam Buras; 23. Ayam Ras; 24. Itik; 25. Entok; serta 26. Produksi Susu. Dari indikator tersebut akan dilakukan pemeringkatan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kurang Sekali terdapat 8 Kabupaten/Kota, yaitu: Pacitan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kurang terdapat 8 Kabupaten/Kota, yaitu: Ponorogo, Situbondo, Ngawi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kota Probolinggo. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Cukup terdapat 9 Kabupaten/Kota, yaitu: Trenggalek, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, Magetan, dan Kota Batu.

Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik terdapat 10 Kabupaten/Kota, yaitu: Tulungagung, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Baik Sekali terdapat 2 Kabupaten/Kota, yaitu: Malang dan Jombang. Kinerja Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Sangat Baik Sekali terdapat 1 Kabupaten/Kota, yaitu: Gresik. Dari uraian diatas, dengan indikator aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori Baik yaitu sebanyak 10 Kabupaten/Kota.



Gambar 5. Nilai Aktivitas Ekonomi Masing-Masing Kabupaten/Kota

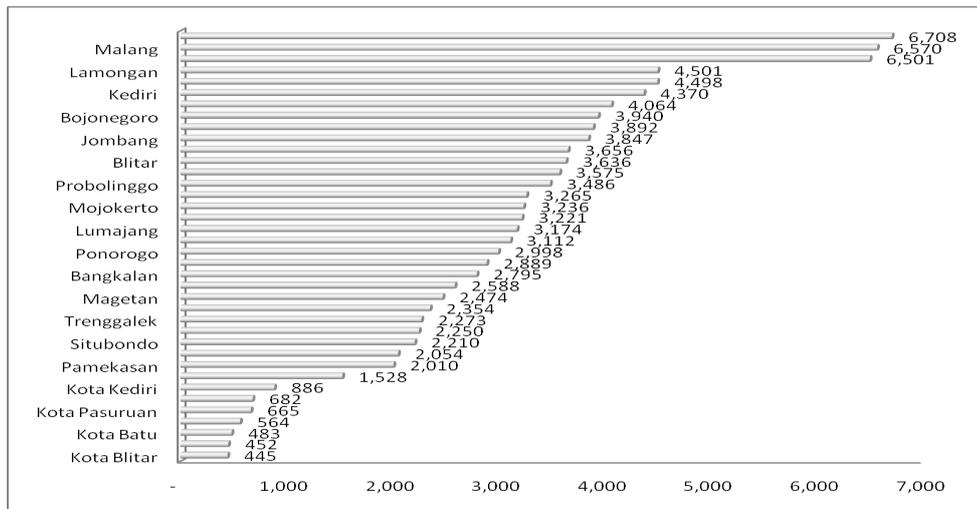
Dari aspek aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Malang, yaitu dengan nilai daya saing sebesar 27,23. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kota Mojokerto dengan nilai daya saing sebesar 10,46.

Kemampuan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan ditunjukkan dengan ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota. Semakin bervariasi dan lengkap fasilitas suatu Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tersebut mampu memberikan pelayanan yang lebih lengkap kepada masyarakat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain. Kondisi inilah yang mengakibatkan suatu Kabupaten/Kota berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan bagi Kabupaten/Kota di sekitarnya.

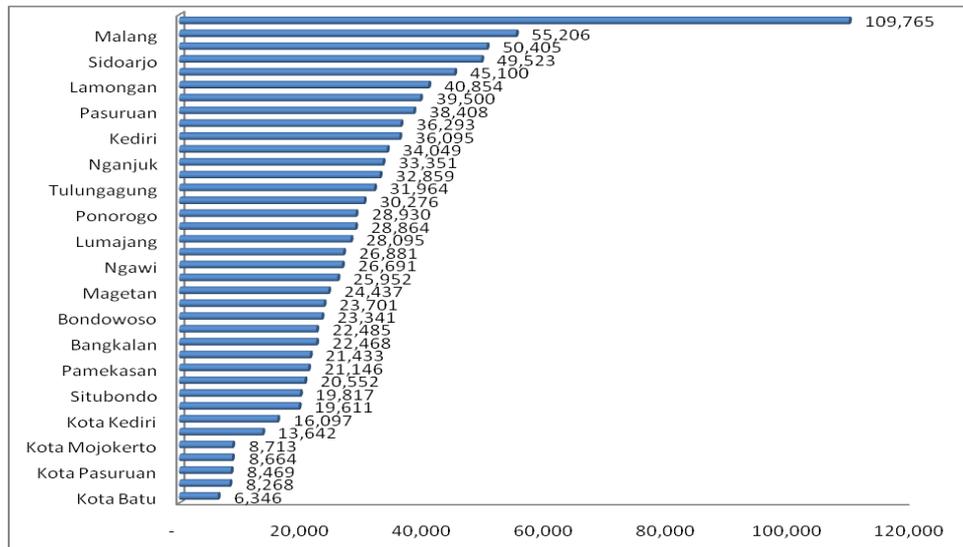
Fasilitas yang akan dianalisis dengan scalogram dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: 1. Fasilitas yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan; dan 2. Fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan

Kabupaten/Kota yang mempunyai fasilitas terlengkap berdasarkan analisis scalogram yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya menduduki peringkat pertama untuk total dari 2 kelompok yaitu Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan.

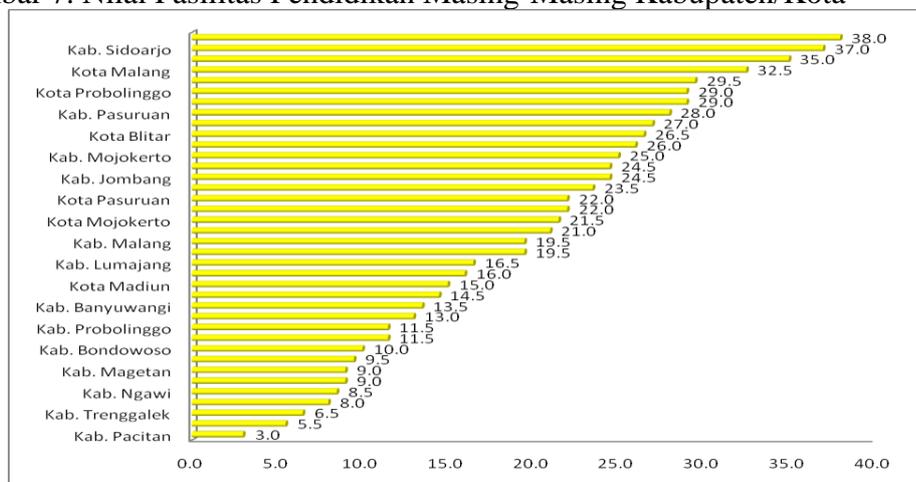
Dari aspek Fasilitas Kesehatan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Jember, yaitu dengan nilai daya dukung sebesar 6.708. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kota Blitar dengan nilai daya dukung sebesar 445.



Gambar 6. Nilai Fasilitas Kesehatan Masing-Masing Kabupaten/Kota



Gambar 7. Nilai Fasilitas Pendidikan Masing-Masing Kabupaten/Kota



Gambar 8. Nilai Kemandirian Keuangan Daerah Masing-Masing Kabupaten/Kota

Dari aspek Fasilitas Pendidikan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kota Surabaya, yaitu dengan nilai daya dukung sebesar 109.765. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kota Blitar dengan nilai daya dukung sebesar 6.346.

Pengukuran kinerja kemandirian keuangan daerah digunakan analisis kinerja keuangan. Dari hasil analisis kemandirian keuangan daerah, daerah yang mempunyai kinerja paling baik adalah Kota Surabaya. Daerah tersebut merupakan daerah yang mempunyai tingkat kemandirian keuangan paling tinggi di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kota Surabaya menempati peringkat ke-1 untuk semua kriteria pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai 38,0.

Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah dari aspek kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten Pacitan. Daerah tersebut mempunyai kemandirian keuangan hanya sebesar 3,0.

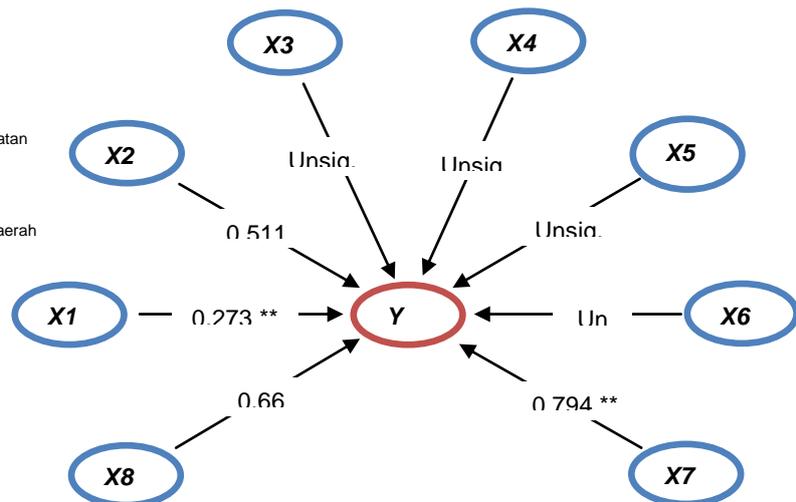
Dalam mengukur besarnya pengaruh Jumlah Sektor Unggulan (X_1), Kategori Kondisi Geografis (X_2), Kategori Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (X_3), Kategori Kondisi Pendidikan Masyarakat (X_4), Kategori Aktivitas Ekonomi (X_5), Nilai Fasilitas Kesehatan (X_6), Nilai Fasilitas Pendidikan (X_7), dan Nilai Kemandirian Keuangan Daerah (X_8) terhadap Perkapita (Y) di Jawa Timur dilakukan dengan alat regresi linier berganda, adapun model hasil analisis dapat diinterpretasinya sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 - \beta_2 \log X_2 - \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + \beta_5 \log X_5 + \beta_6 \log X_6 + \beta_7 \log X_7 + \beta_8 \log X_8$$

Berikut ini nilai koefisien pengaruh masing-masing variabel terhadap pendapatan per kapita:

$$\text{Log } Y = 9,385 + 0,273 \log X_1 - 0,511 \log X_2 - 0,159 \log X_3 + 0,240 \log X_4 + 0,276 \log X_5 + 0,284 \log X_6 + 0,794 \log X_7 + 0,664 \log X_8$$

- Keterangan:
 Y = Pendapatn Per Kapita
 X1 = Jumlah Komoditi Unggul
 X2 = Kon. geografis
 X3 = Kesejahteraan dan Kesehatan
 X4 = Pendidikan Masyarakat
 X5 = Aktivitas Ekonomi
 X6 = Fasilitas Kesehatan
 X7 = Fasilitas Pendidikan
 X8 = Kemandirian Keuangan Daerah
 * = α 5%
 ** = α 20%
 Unsig. = tidak signifikan



Sumber: Hasil analisis ekonometrik diolah
 Gambar 9. Variabel-variabel Yang Berpengaruhnya terhadap Pendapatan per Kapita Masyarakat di Jawa Timur

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat di Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 9.

Dari hasil regresi berganda diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Sektor Unggulan (X_1), Kategori Kondisi Pendidikan Masyarakat (X_4), Kategori Aktivitas Ekonomi (X_5), Nilai Fasilitas Kesehatan (X_6), Nilai Fasilitas Pendidikan (X_7), dan Nilai Kemandirian Keuangan Daerah (X_8) berpengaruh positif terhadap variabel terkait (perkapita). Untuk Kategori Kondisi Geografis (X_2) dan Kategori Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (X_3), berpengaruh negatif terhadap perkapita.

Berdasarkan hasil regresi, nilai F hitung sebesar 6,58 Sedangkan F tabel ($\alpha = 0,05$; db regresi = 8 ; db residual = 30) adalah sebesar 2,27. Karena F hitung > F tabel yaitu 6,55 > 2,27 maka analisis regresi adalah signifikan. Pengaruh Jumlah Sektor Unggulan (X_1), Kategori Kondisi Geografis (X_2), Kategori Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (X_3), Kategori Kondisi Pendidikan Masyarakat (X_4), Kategori Aktivitas Ekonomi (X_5), Nilai Fasilitas Kesehatan (X_6), Nilai Fasilitas Pendidikan (X_7), dan Nilai Kemandirian Keuangan Daerah (X_8) terhadap perkapita adalah besar. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas.

Untuk uji parsial, digunakan uji t test, t test antara LX_1 (Jumlah sektor unggulan) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = 1,389 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,20$; db

residual = 30) adalah sebesar 1,310. Karena t hitung > t tabel yaitu 1,389 > 1,310 maka pengaruh LX_1 (Jumlah sektor unggulan) adalah signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 20\%$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Jumlah sektor unggulan.

t test antara LX_2 (kategori kondisi geografis) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = -1,327 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,20$; db residual = 30) adalah sebesar 1,310. Karena t hitung > t tabel yaitu 1,327 > 1,310 maka pengaruh LX_1 (kategori kondisi geografis) adalah signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 20\%$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi geografis.

t test antara LX_3 (kondisi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = -1,060 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,20$; db residual = 30) adalah sebesar 1,310. Karena t hitung < t tabel yaitu 1,060 < 1,310 maka pengaruh LX_3 (kondisi kesejahteraan dan kesehatan) adalah tidak signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 20\%$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

t test antara LX_4 (kondisi pendidikan masyarakat) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = 1,192 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,20$; db residual = 30) adalah sebesar 1,310. Karena t hitung < t tabel yaitu 1,192 <

1,310 maka pengaruh LX_4 (kondisi pendidikan masyarakat) adalah tidak signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 20\%$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi pendidikan masyarakat.

t test antara LX_5 (Aktivitas Ekonomi) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = 1,181 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,20$; db residual = 30) adalah sebesar 1,310. Karena t hitung < t tabel yaitu 1,181 < 1,310 maka pengaruh LX_5 (Aktivitas Ekonomi) adalah tidak signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 20\%$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita tidak dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas ekonomi.

t test antara LX_6 (Nilai Fasilitas Kesehatan) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = 0,565 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,20$; db residual = 30) adalah sebesar 1,310. Karena t hitung < t tabel yaitu 0,565 < 1,310 maka pengaruh LX_6 (Nilai Fasilitas Kesehatan) adalah tidak signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 20\%$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Fasilitas Kesehatan.

t test antara LX_7 (Nilai Fasilitas Pendidikan) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = 1,695 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,20$; db residual = 30) adalah sebesar 1,310. Karena t hitung > t tabel yaitu 1,695 > 1,310 maka pengaruh LX_7 (Nilai Fasilitas Pendidikan) adalah signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 20\%$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa

perkapita dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Fasilitas Pendidikan.

t test antara LX_8 (Nilai Kemandirian Keuangan Daerah) dengan LY (perkapita) menunjukkan t hitung = 3,590 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,05$; db residual = 30) adalah sebesar 1,697. Karena t hitung > t tabel yaitu 3,590 > 1,697 maka pengaruh LX_8 (Nilai Kemandirian Keuangan Daerah) adalah signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkapita dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Nilai Kemandirian Keuangan Daerah.

Adapun koefisien determinasi R^2 sebesar 0,645 Artinya bahwa 64,4 % variabel Perkapita akan dijelaskan oleh variabel bebasnya, yaitu Jumlah Sektor Unggulan, Kategori Kondisi Geografis), Kategori Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat, Kategori Kondisi Pendidikan Masyarakat, Kategori Aktivitas Ekonomi, Nilai Fasilitas Kesehatan, Nilai Fasilitas Pendidikan, dan Nilai Kemandirian Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 35,6% variabel Perkapita akan dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan melalui uji normalitas, autokorelasi, dan multikolinieritas dinyatakan lolos.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mengenai pengukuran kinerja daerah kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur, maka diperoleh temuan-temuan yang dapat disimpulkan sektor tersier memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 49.40%. Peran sektor ini didominasi sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

yang memberikan kontribusi sebesar 30.45%,

Berdasarkan analisis struktur ekonomi masing-masing daerah menunjukkan bahwa ada 25 daerah yang aktivitas ekonominya didominasi oleh kontribusi sektor tertier, ada 9 daerah yang aktivitas ekonominya didominasi sektor primer, Sementara daerah yang aktivitas ekonominya yang dominan sektor sekunder ada 3 daerah yaitu Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan Kota Kediri;

Berdasarkan jumlah sektor unggulan yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, daerah yang mempunyai kinerja paling bagus adalah daerah: Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

Berdasarkan jumlah sektor potensial yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, daerah yang mempunyai kinerja paling bagus adalah daerah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan kriteria sektor potensi, daerah yang mempunyai kinerja paling baik adalah Kota Mojokerto dan Kabupaten Pacitan. Kedua daerah tersebut mempunyai sektor dengan kriteria "sektor unggulan dan sektor potensi" (K1) sebanyak empat sektor.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi kelas menunjukkan bahwa Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya merupakan daerah dengan pola pertumbuhan wilayah "Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"; Kota Kediri merupakan Kota yang tergolong daerah "Berkembang Cepat". Ciri daerah mempunyai klasifikasi ini adalah daerah yang pertumbuhannya cepat namun pendapat per kapitanya

masih dibawah pendapatan per kapita Propinsi Jawa Timur; Sedangkan Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Kota Batu tergolong pada pola pertumbuhan wilayah "Maju Tapi Tertekan"; Sementara Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tergolong pada pola pertumbuhan wilayah "Relatif Tertinggal".

Angka indeks Entropi Theil sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 yaitu sebesar 0,43 menjadi 0,44. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang semakin membesar pada tahun terakhir pengamatan.

Berdasarkan hasil analisis daya saing, maka ditemukan kinerja masing-masing daerah, dari aspek kondisi geografis menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Malang. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah terdapat dua daerah, yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Mojokerto. Aspek kesehatan dan kesejahteraan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kota Malang. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kabupaten. Aspek kondisi pendidikan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kabupaten Sampang. Aspek aktivitas

ekonomi menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Malang. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil analisis daya dukung, maka diperoleh temuan-temuan, aspek Fasilitas Kesehatan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kabupaten Jember. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kota Blitar. Aspek Fasilitas Pendidikan menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai kinerja tertinggi adalah Kota Surabaya. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah adalah Kota Blitar. Namun secara nilai total, daerah yang mempunyai kinerja paling baik adalah Kota Surabaya.

Hasil analisis kemandirian keuangan daerah, daerah yang mempunyai kinerja paling baik adalah Kota Surabaya. Sedangkan daerah yang mempunyai kinerja paling rendah dari aspek kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten Pacitan.

Hasil regresi berganda diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Sektor Unggulan (X_1), Kategori Kondisi Pendidikan Masyarakat (X_4), Kategori Aktivitas Ekonomi (X_5), Nilai Fasilitas Kesehatan (X_6), Nilai Fasilitas Pendidikan (X_7), dan Nilai Kemandirian Keuangan Daerah (X_8) berpengaruh positif terhadap variabel terkait (perkapita). Untuk Kategori Kondisi Geografis (X_2) dan Kategori Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (X_3),berpengaruh negatif terhadap perkapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., Boediono. 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Arsyad Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Arsyad Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta
- Badrudin Rudy. 1999. "Pembangunan Wilayah Propinsi Istimewa Yogyakarta Pendekatan Teoritis". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4 No. 2
- Blakely, Edward. J. 1994. *Planing Local Economic Development Theory and Practice*. Second Edition. USA. Sage Publication.
- Brojonegoro, Bambang P.S. 1999. "The Impact of Currnt Economic Crisis to Regional Development Pattern in Indonesia". *Paper*. LPEM-FEUI. Jakarta.
- BPS. 1998. *1996 Economic Census Complete Count Result: Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Dick, H., Fox, J. J., & Mackie, J. (Eds.). 1993. *Balanced Development: East Java in the New Order*. Singapore: Oxford University Press.

- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*. (3rd edition ed). New York. Mc-Graw Hill Inc
- Haerudin, Andi. 2001. *Identifikasi Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Soppeng 1994/1995-1999/2000*. Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM. Tidak dipublikasikan.
- Hill, H. 1996. *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giants*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Isard, W. 1956. *Location and Space Economy*. Cambridge: MIT Press.
- Juoro, U. 1989. "Perkembangan Studi Ekonomi Aglomerasi dan Implikasi Bagi Perkembangan Perkotaan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 37 No. 2.
- Kuncoro M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis)*. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro M. 2001. *Analisis Spasial dan Regional (Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia)*. UPP AMPYKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, M., Adji, A., & Pradiptyo. R. 1997. *Ekonomi Industri: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Yogyakarta: Widya Sarana Informatika.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (1st ed.), Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maijidi, Nasyith. 1997. "Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah", *Prisma*, No. 3
- Perroux. 1950. *Economic Development Culture Change, Growth and Development*. Hafner Publishing Company. New York
- Setyarini, Djati. 1999. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis S-2 Program Pascasarjana. UGM, Tidak dipublikasikan.
- Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat". *Prisma*. LP3ES. No.3.
- Soepono, Prasetyo. 1998. "Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Van Thunen yang dimodifikasi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 13 No.2.
- Soepono, Prasetyo. 2000. "Model Gravitasi sebagai Alat Pengukur *Hinter Land* dari *Central Place* suatu Tinjauan Teoritik". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 15 No. 4.
- Soepono, Prasetyo. 1999. "Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah". *Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis. Vol. 14
No.4.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. LP3ES UI. Jakarta.

Sutarno. 2002. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan PDRB Per Kapita Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, (1993-2000)*. Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM. Tidak dipublikasikan.

Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar)*. Erlangga. Jakarta.

Warpani, Suwarjoko. 1983. *Analisis Kota dan Daerah*. Edisi ketiga. ITB Bandung.

Wei, Y., Dennis and Fan, C., Cindy. 2000. "Regional Inequality in China: A case Study of Jiangsu Province". *Asian Economic Journal*. Vol 52.

Williamson, J.G. 1965. "Regional Inequality and The Process of National Development, a description of Pattern". *Economic Development and Cultural Change*. Vol. XXXVII No. 27, 11-13.

Ying, Long, G. 2000. "China's Changing Regional Disparities during the Reform Period". *Economic Geography*. Vol. XXIV No. 7